KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

			FINAL/ HDAN FINAL				
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 3 8 5			H.4 X Final		
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 1 5 9 8 1 3 9 5 5 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : NURSOLEHA							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	21 YANG DIPOTONG KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	В.3	B.4	NPWP) B.5	B.6	B.7	
2	21-402-01	1.435.900	1.435.900	0	5	71.795	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 83							
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 3 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor : Tanggal dd mmyyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2				0 0 0			
C.2 Nama Insta							
C.3 ID Subunit	Organisasi :		oxdotn $oxdotn$ $oxdotn$				
C.4 Tanggal	:	2 3 dd 0 2 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Pena	ındatangan :	HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan	ı Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.					
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperi	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	r mengatur bahwa dok	umen ini tela	ah ditandatangani secara	

0AQIXJ89